

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD Kota Medan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, variabel penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,173. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ( $H_{a1}$  diterima). Hasil penelitian menyatakan bahwa  $H_1$  diterima. Artinya, semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah yang maka kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan juga akan semakin baik.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi  $0,003 < 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,201. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ( $H_{a2}$  diterima). Artinya, semakin kompeten sumber daya

yang dimiliki, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkanpun akan lebih baik.

3. Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,240. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ( $H_{a3}$  diterima). Artinya, semakin baik pengendalian internal yang dilakukan oleh pimpinan organisasi, maka peluang terjadinya kesalahan atau kecurangan yang dilakukan didalam organisasi juga akan semakin kecil, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin baik/berkualitas.

Berdasarkan hasil pengujian statistik, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,671. Hal ini berarti dalam penelitian mengenai kualitas laporan keuangan yang dibahas dalam penelitian ini mampu dijelaskan oleh variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal sebesar 67,1%, sedangkan untuk 22,9% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menguji kembali penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini, untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintah hasilnya konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2018) dan Pujanira (2017). Kemudian variabel kompetensi sumber daya manusia hasilnya konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh

Barus (2017) dan Utama (2017). Untuk variabel sistem pengendalian internal hasilnya konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2018), Ningrum (2018), dan Utama (2017).

Hasil pengujian yang sejalan dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini membuktikan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehubungan dengan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah Kota Medan sejak tahun 2015-2019, hal tersebut dikarenakan sepanjang tahun 2015-2019 Kota Medan memiliki berbagai permasalahan terkait pencatatan, pengelolaan aset, kelengkapan dokumen, dan kewajaran laporan keuangan. Dengan demikian untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Kota Medan perlu didukung oleh penerapan SAP yang baik, sumber daya manusia yang berkompeten, serta sistem pengendalian internal yang memadai dalam proses penyusunan laporan keuangan supaya laporan keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas.

Sehubungan dengan penemuan butir-butir pernyataan kuesioner yang masih mendapat nilai rendah terkait penerapan SAP, diharapkan pemerintah Kota Medan dapat lebih memperhatikan poin-poin yang masih memperoleh nilai rendah supaya penerapan SAP di tiap-tiap OPD dapat sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian terkait kompetensi SDM, diharapkan pemerintah Kota Medan dapat lebih memperhatikan terkait kompetensi SDM yang dimiliki, dengan memberi pengetahuan terkait peraturan tentang SAP dan akuntansi, serta memberi pelatihan secara langsung terhadap pegawai-pegawai yang terikat langsung dengan

proses akuntansi agar tercipta kerja yang cepat dan tepat, serta memberikan rasa aman bagi pegawai untuk berani mencegah intervensi yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan. Selanjutnya terkait SPI, diharapkan supaya para pemimpin di masing-masing OPD dapat mengambil tindakan yang tegas atas setiap pelanggaran yang dilakukan pegawai serta melakukan analisis risiko dengan lengkap dan menyeluruh demi mencegah terjadinya kecurangan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu juga diharapkan informasi yang disajikan mengenai laporan keuangan dapat disajikan secara tepat waktu agar memungkinkan dilakukannya tindakan korektif supaya laporan keuangan yang disajikan lebih berkualitas. Lalu terkait kualitas LKPD diharapkan pemerintah Kota Medan dapat lebih memfokuskan proses penyusunan laporan keuangan pada kesalahan yang bersifat material supaya terbebas dari salah saji material.

Pada tahun 2021 dan 2022 pemerintah Kota Medan telah berhasil mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK untuk laporan keuangan tahun 2020 dan 2021. Sehingga diharapkan pemerintah Kota Medan dapat mempertahankan kinerja baiknya tersebut dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas, supaya ditahun-tahun berikutnya pemerintah Kota Medan mampu memperahankan opini WTP tersebut.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan pengambilan data menggunakan kuesioner yang seharusnya berbentuk *google form* menjadi kuesioner fisik berbentuk kertas karena sebagian besar staf OPD Kota Medan menolak untuk pengisian kuesioner berbentuk *g-form/link*. Oleh karena itu, waktu pengambilan data yang awalnya ditetapkan selama 2 minggu menjadi lebih lama, yaitu 3 minggu dikarenakan peneliti harus menyebarkan kuesioner dan mengambilnya kembali secara satu per satu ke seluruh OPD Kota Medan. Kemudian, dalam melakukan pengisian kuesioner banyak responden yang menjawab hanya menyamakan jawaban dari responden lain sebagai rekan kerjanya, sehingga jawaban yang diberikan tidaklah benar-benar sesuai dengan pendapat responden yang sebenarnya. Hal ini kemungkinan dikarenakan responden yang tidak begitu memahami pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner.

## 5.3. Saran

Dari hasil penelitian ini, berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan untuk peneliti selanjutnya dan pemerintah Kota Medan:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis, sebaiknya menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti untuk pertanyaan kuesionernya supaya responden dapat menjawab dengan maksimal. Kemudian juga peneliti selanjutnya bisa memilih objek lain supaya dapat membuktikan konsistensi hasil penelitian.
2. Bagi pemerintah Kota Medan yang telah memperoleh opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2021, bisa lebih meningkatkan lagi penerapan

SAP, memberikan pelatihan langsung bagi stafnya untuk menambah kompetensi atau pengetahuan terkait laporan keuangan, serta meningkatkan lagi pengendalian internal di tiap-tiap OPD, supaya laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih baik dan dapat mempertahankan opini WTP dari BPK untuk tahun-tahun selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, & James, A. &. (2006). *Auditing Edisi Indonesia, Alih bahasa oleh Amir Abadi Yusuf*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Barus, S. (2017). *Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderating*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi 3)*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman (6th ed.)*. Yogyakarta: BPFE.
- Halim, A. (2003). *Analisis Investasi Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutapea, P., & Thoha, N. (2008). *KOMPETENSI PLUS: Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Jusup, A. H. (2014). *Auditing (Pengauditan Berbasis ISA) Edisi 2*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 3)*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Mangkunegara, A. P. (2012). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Munawir, S. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Edisi Keempat*. Yogyakarta: Liberty.
- Ningrum, K. K. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen*. Skripsi: Universitas Islam Indonesia.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Pemerintah Kota Medan. (2014, Februari 12). Dinas Daerah. Diakses dari <https://pemkomedan.go.id/hal-dinas-daerah>.
- Pemerintah Kota Medan. (2014, Februari 18). Kecamatan. Diakses dari <https://pemkomedan.go.id/hal-kecamatan>.
- Pemerintah Kota Medan. (2014, Januari 2). Sekretariat Daerah. Diakses dari <https://pemkomedan.go.id/hal-sekretariat-daerah>.
- Pemerintah Kota Medan. (2014, Februari 12). Sekretariat DPRD. Diakses dari <https://pemkomedan.go.id/hal-sekretariat-dprd>.
- Pujanira, P. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY*. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 2, 8–17.
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, Kementerian Keuangan RI.
- \_\_\_\_\_. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- \_\_\_\_\_. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Kementerian Keuangan RI.
- \_\_\_\_\_. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Keuangan RI.



- \_\_\_\_\_. (2014). Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- \_\_\_\_\_. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan RI.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi (Edisi 13)* (Kikin Sakinah Nursafira & Novita Puspasari, Penerjemah). Jakarta: Salemba Empat.
- Scott, W. R. (2003). *Financial Accounting Theory, Third Edition*. United States of America: Prentice Hall.
- Utama, R. J. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fekon*, 4, 1429–1443.
- Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori Aplikasi Dan Penelitian (Edisi Pertama)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yadiati, W., & Mubarak, A. (2017). *Kualitas Pelaporan Keuangan (Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

**LAMPIRAN I**  
**KUESIONER PENELITIAN**

**I. IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : L / P (lingkari pada pilihan yang sesuai)
3. Usia :
4. Pendidikan : SMA D3 Lainnya...  
S1 S2
5. Jabatan :
6. Lama Bekerja :
7. Nama OPD :

**II. PETUNJUK PENGISIAN**

- 1) Mohon memberi tanda centang (√) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai dan mohon mengisi bagian yang membutuhkan jawaban tertulis.
- 2) Setelah mengisi kuesioner ini mohon Bapak/Ibu dapat memberikan kembali kepada yang menyerahkan kuesioner ini pertama kali.
- 3) Keterangan alternatif jawaban dan skor:
  - a) STS = Sangat Tidak Setuju (1)
  - b) TS = Tidak Setuju (2)
  - c) S = Setuju (3)
  - d) SS = Sangat Setuju (4)